



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MIRZA SOFJANHADI MASHUDI**
2. Jabatan : **INSPEKTUR**
3. NHK : **172868**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **2.540.000.000**

1. Tanah Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 90.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/75 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/60 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **422.250.000**

1. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
115.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA BEAT STREET Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 12.750.000
3. MOTOR, HONDA HONDA SCOOPY PRESTIGE Tahun 2022,
HASIL SENDIRI Rp. 19.500.000
4. MOBIL, HONDA CITY RS WITH HONDA SENSING Tahun 2023,
HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **248.849.519**

D. SURAT BERHARGA Rp. **188.130.626**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.854.425.411**

F. HARTA LAINNYA Rp. **116.840.726**

Sub Total Rp. **9.370.496.282**



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

9.370.496.282

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.